



## Manajemen Pencegahan dan Kesiapsiagaan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanganan Banjir di Kabupaten Ogan Komering Ulu

Laras Septi<sup>1</sup>, Maileni<sup>2</sup>, Ilma Sintia<sup>3</sup>, Nabil Zain Alkowi<sup>4</sup>, Eva Susanti<sup>5</sup>

Universitas Baturaja, Indonesia<sup>1-5</sup>

Email Korespondensi: [larasseptiyjsn20@gmail.com](mailto:larasseptiyjsn20@gmail.com), [lmai59028@gmail.com](mailto:lmai59028@gmail.com),  
[ilmasintia75@gmail.com](mailto:ilmasintia75@gmail.com), [zeynnabil02@gmail.com](mailto:zeynnabil02@gmail.com), [evaefotos@gmail.com](mailto:evaefotos@gmail.com)

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 25 April 2026

### ABSTRACT

Floods are one of the most frequent natural disasters in Ogan Komering Ulu (OKU) Regency, South Sumatra. This study aims to describe how the OKU Regency Regional Disaster Management Agency (BPBD) implements flood prevention and preparedness management. The study used a qualitative descriptive approach, with data collection techniques consisting of in-depth interviews with two BPBD OKU officers: Tiara (Technical Analyst for Prevention and Preparedness) and Wandi (Pusdalog Team). The results indicate that the BPBD OKU has implemented socialization of the Information and Education Communication (IEC) program, developed a Disaster Risk Assessment Document, installed an early warning system at strategic points, and developed a volunteer network in nine sub-districts. The major flood of 2024, which hit 11 of the 13 sub-districts and claimed six lives, presented a critical opportunity to improve the disaster management system. Challenges faced include limited human resources and equipment, and a lack of community awareness of the environment. The BPBD hopes that the OKU community will become more independent and prepared in the future for flood disasters.

**Keywords:** BPBD, Disaster Management, Flood, Prevention, Preparedness, Ogan Komering Ulu.

### ABSTRAK

Banjir merupakan salah satu bencana alam yang paling sering terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan. Penelitian ini bertujuan menggambarkan bagaimana BPBD Kabupaten OKU menjalankan manajemen pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana banjir. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam terhadap dua orang petugas BPBD OKU, yaitu Tiara (Penelaah Teknis Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan) dan Wandi (Tim Pusdalog). Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD OKU telah menjalankan program sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana, pemasangan sistem peringatan dini di titik-titik strategis, serta membangun jaringan relawan di 9 kecamatan. Banjir besar tahun 2024 yang melanda 11 dari 13 kecamatan dan menewaskan 6 orang menjadi momentum penting perbaikan sistem penanggulangan bencana. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan SDM dan peralatan, serta perilaku masyarakat yang masih kurang peduli terhadap lingkungan. BPBD berharap masyarakat OKU ke depan semakin mandiri dan siap siaga dalam menghadapi bencana banjir.

**Kata Kunci:** BPBD, Manajemen Bencana, Banjir, Pencegahan, Kesiapsiagaan, Ogan Komering Ulu.

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang paling rentan terhadap bencana alam di dunia. Letak geografisnya di kawasan cincin api Pasifik serta iklim tropis yang memiliki curah hujan tinggi membuat berbagai wilayah di Indonesia kerap mengalami bencana, termasuk banjir. Banjir bukan sekadar peristiwa alam biasa dampaknya sangat nyata contohnya seperti rumah rusak, infrastruktur hancur, aktivitas masyarakat lumpuh, bahkan nyawa melayang.

Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) di Provinsi Sumatera Selatan adalah salah satu wilayah yang hampir setiap tahun dilanda banjir. Dari 13 kecamatan yang ada, hampir semuanya pernah terdampak banjir, meskipun dengan skala yang berbeda-beda. Puncaknya terjadi pada tahun 2024, ketika banjir besar akibat luapan sungai melanda 11 kecamatan sekaligus, menewaskan 6 orang, dan memaksa ribuan warga untuk mengungsi.

Untuk menangani ancaman bencana ini, pemerintah pusat membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat nasional dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat kabupaten/kota melalui Undang-Undang No. 24 Tahun 2007. BPBD Kabupaten OKU sendiri berdiri sejak tahun 2010 dan bertanggung jawab atas seluruh siklus penanggulangan bencana, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca bencana.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana BPBD Kabupaten OKU mengelola pencegahan dan kesiapsiagaan banjir? Apa saja program yang sudah dijalankan? Kendala apa yang dihadapi? Dan bagaimana harapan ke depannya? Data dikumpulkan langsung melalui wawancara mendalam dengan petugas BPBD yang terlibat langsung di lapangan, sehingga gambaran yang disajikan dalam artikel ini adalah kondisi nyata di lapangan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan mudah dipahami tentang upaya penanggulangan banjir di Kabupaten OKU, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pengembangan kebijakan manajemen bencana di daerah.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk memahami dan menggambarkan fenomena secara mendalam, bagaimana BPBD Kabupaten OKU menjalankan manajemen pencegahan dan kesiapsiagaan banjir bukan untuk mengukur atau menguji hipotesis tertentu. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara dilakukan secara langsung di Kantor BPBD Kabupaten OKU, yang beralamat di Jalan A. Yani KM 7, Kelurahan Kemelak Bindung Langit, Baturaja.

Informan penelitian terdiri dari dua orang petugas BPBD OKU yang terlibat langsung dalam penanganan bencana banjir: (1) Tiara: Penelaah Teknis Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten OKU. Bergabung di BPBD sejak tahun 2020. Tugas utamanya adalah membuat dokumen pra banjir, keputusan bupati siaga bencana banjir, dan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. (2)

Wandi: Anggota Tim Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalog) BPBD Kabupaten OKU. Bergabung di BPBD sejak tahun 2014. Berperan mengumpulkan data terdampak bencana seperti jumlah KK yang terdampak, ketinggian air, dan penyebab banjir. Data dari hasil wawancara kemudian dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menjelaskan dan menggambarkan hasil penelitian sesuai dengan apa yang disampaikan langsung oleh narasumber. Kutipan wawancara ditulis secara apa adanya agar data tetap asli dan jujur.

Dokumentasi Kegiatan Wawancara Penelitian:



Gambar 1. Foto bersama petugas BPBD Kabupaten OKU usai sesi wawancara



Gambar 2. Suasana kegiatan penelitian di depan Kantor BPBD OKU

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Profil BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu*

BPBD Kabupaten OKU dibentuk pada tahun 2010 sebagai upaya untuk mengelola bencana secara lebih terstruktur di tingkat daerah. Lembaga ini berada di bawah koordinasi BNPB di tingkat pusat dan bertanggung jawab kepada Bupati OKU di tingkat daerah. Tugas utama BPBD OKU mencakup tiga tahapan siklus bencana secara berurutan: pada fase pra bencana berfokus pada pencegahan dan kesiapsiagaan, pada saat bencana menangani logistik dan peralatan, serta pada fase pasca bencana melaksanakan rehabilitasi konstruksi. Kantor utama BPBD terletak di Kelurahan Kemelak Bindung Langit, sementara satu posko tambahan beserta gudang peralatan berada di wilayah Bakung. Pasca banjir besar 2024, fungsi

---

gudang di Bakung semakin krusial karena kapasitas penyimpanan di Kemelak tidak lagi memadai untuk menampung tambahan bantuan peralatan yang datang dari pemerintah provinsi.

### ***Program Pencegahan Banjir***

Upaya pencegahan banjir yang dijalankan BPBD OKU berpusat pada dua hal utama: edukasi masyarakat melalui program Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), serta penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana. Program sosialisasi KIE menasar masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana, termasuk siswa dari berbagai jenjang sekolah mulai SD hingga SMA, serta kader Posyandu. Pilihan sasaran ini bukan tanpa alasan: melalui sekolah, pengetahuan kebencanaan dapat tersebar lebih luas karena siswa cenderung menyampaikan kembali informasi yang mereka terima kepada keluarga di rumah; sedangkan kader Posyandu memiliki akses langsung kepada ibu-ibu rumah tangga di lingkungan sekitar. Materi sosialisasi mencakup pemahaman dasar tentang banjir, langkah-langkah yang harus dilakukan saat terjadi banjir, serta pengenalan peralatan kebencanaan.

Selain sosialisasi, BPBD OKU juga tengah menyusun Dokumen Kajian Risiko Bencana yang memuat peta bahaya, peta kapasitas, dan peta multi bahaya. Pada tahun 2025, proses penyusunan dokumen ini telah mencapai sekitar 80% dan diperkirakan akan selesai pada tahun 2026. Penentuan wilayah rawan banjir selama ini masih berbasis data historis kejadian banjir yang pernah terjadi sebelumnya, dan kehadiran dokumen kajian risiko ini diharapkan menjadikan pemetaan wilayah rawan lebih sistematis dan berbasis analisis risiko yang komprehensif.

### ***Kesiapsiagaan Sebelum Banjir dan Sistem Peringatan Dini***

Upaya kesiapsiagaan BPBD OKU sebelum terjadinya banjir meliputi empat langkah utama: persiapan personel dari segi kapasitas, pelaksanaan simulasi penggunaan peralatan, pemantauan debit air sungai secara berkala, serta pemasangan sistem peringatan dini di titik-titik strategis seperti Gunung Liwat Pengandonan, dan Sukaraja Lengkiti. Sistem ini memungkinkan informasi peringatan disebarluaskan kepada masyarakat sebelum banjir benar-benar terjadi.

Penyebaran informasi peringatan dini dilakukan melalui jaringan relawan yang tersebar di sembilan titik, yaitu delapan pos di tingkat kecamatan mencakup Ulu Ogan, Muara Jaya, Pengandonan, Semidang Aji, Lubuk Batang, Peninjauan, Lengkiti, dan Sosoh Buay Rayap serta satu pos di Kota Baturaja, yang semuanya berkoordinasi melalui kantor camat setempat. Para relawan bertugas memantau langsung ketinggian dan debit air sungai, kemudian meneruskan informasi tersebut melalui grup WhatsApp ke sesama relawan sebelum disampaikan kepada masyarakat. Meski tergolong sederhana, sistem komunikasi berbasis WhatsApp ini terbukti efektif karena mudah digunakan oleh semua kalangan dan tidak memerlukan infrastruktur teknologi yang rumit. Jaringan sembilan pos relawan ini memastikan informasi dapat mengalir cepat dari lapangan ke masyarakat luas, sekaligus menjadi model yang relevan untuk diadopsi oleh BPBD daerah lain.

### ***Koordinasi dan Kerja Sama Lintas Sektor***

Penanganan banjir tidak dapat dilakukan oleh BPBD secara sendiri, melainkan membutuhkan sinergi dengan berbagai pihak. Dalam praktiknya, kerja sama BPBD OKU dengan berbagai instansi sebagian besar masih bersifat informal. Kerja sama tertulis dengan pihak swasta seperti Pertamina masih dalam proses penyusunan, sementara kolaborasi dengan perusahaan seperti PT Semen dan PT BA baru terjalin secara situasional saat banjir berlangsung. Sebaliknya, untuk penanganan darurat, Polisi dan TNI telah terintegrasi ke dalam Tim Reaksi Cepat (TRC) bersama BPBD, yang secara signifikan memperkuat kemampuan respons di lapangan.

Dari sisi logistik, pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi dilakukan melalui koordinasi antara BPBD, Dinas Sosial, dan Bulog. Kerja sama dengan Bulog secara khusus diarahkan untuk membuka dapur umum bagi korban banjir di lokasi pengungsian. Meskipun mekanisme koordinasi ini berjalan cukup baik, masih terbatasnya perjanjian kerja sama yang dituangkan secara tertulis dengan pihak swasta menjadi hal yang perlu segera ditindaklanjuti guna memastikan dukungan sumber daya berjalan lebih terstruktur dan berkelanjutan.

### ***Gambaran Banjir 2024: Bencana Terbesar di OKU***

Banjir yang terjadi pada tahun 2024 merupakan salah satu bencana terbesar yang melanda Kabupaten OKU dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun hampir setiap kecamatan kerap terdampak banjir setiap tahunnya, skala dampaknya biasanya tidak terlalu besar. Banjir 2024 menjadi pengecualian: genangan meluas hingga kawasan Bakung dan berdampak pada 11 dari 13 kecamatan yang ada, dipicu oleh luapan sungai akibat curah hujan yang sangat tinggi sehingga menjangkau wilayah yang sebelumnya jarang terdampak.

Banjir ini mengakibatkan 6 orang meninggal dunia, seluruhnya karena nekat menerobos genangan menggunakan kendaraan bermotor hingga terseret arus, dengan salah satu lokasi kejadian berada di kawasan Batanghari. Tragedi ini menggarisbawahi betapa berbahayanya perilaku meremehkan genangan air yang tampak dangkal namun sebenarnya memiliki arus yang kuat sebuah pola yang menjadi penyebab kematian terbanyak saat banjir dan menegaskan pentingnya edukasi keselamatan yang terus-menerus kepada masyarakat. Warga yang terdampak dievakuasi ke posko pengungsian yang dibuka di rumah kabupaten dan lokasi-lokasi aman lainnya, termasuk di Dusun Baturaja yang turut terdampak saat itu.

### ***Kendala dalam Penanganan Banjir***

Meskipun telah menunjukkan berbagai kemajuan, BPBD OKU masih menghadapi sejumlah kendala. Dari sisi internal, keterbatasan peralatan khususnya perahu serta terbatasnya jumlah sumber daya manusia menjadi hambatan utama. Namun, banjir besar 2024 justru menjadi titik balik yang membawa manfaat: BPBD mendapatkan banyak bantuan peralatan dari pemerintah pusat berupa senter, perahu, dan logistik yang secara signifikan memperkuat kapasitas operasional. Tantangan semacam ini sebenarnya lazim dihadapi oleh hampir semua BPBD

daerah di Indonesia, sehingga momen bencana besar kerap sekaligus menjadi katalis percepatan pemenuhan kebutuhan.

Di luar faktor internal, perilaku masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan turut mempersulit upaya penanggulangan banjir. Masih adanya warga yang membangun di atas lahan resapan air mengurangi kemampuan tanah dalam menyerap curah hujan, sementara kebiasaan membuang sampah sembarangan menyumbat saluran drainase dan irigasi. Ketiga faktor inilah hujan tinggi, sistem irigasi yang buruk, dan rendahnya kesadaran lingkungan masyarakat yang saling berkaitan dan menjadi akar penyebab banjir yang berulang di Kabupaten OKU.

### ***Keterlibatan dan Kesadaran Masyarakat***

Di tengah berbagai tantangan tersebut, terdapat modal sosial yang patut diapresiasi: tradisi gotong royong yang masih hidup di masyarakat OKU, terutama di kalangan warga yang tinggal di bantaran sungai. Warga bantaran sungai umumnya sudah memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap risiko banjir karena pengalaman langsung yang berulang. Tantangannya adalah memperluas kesadaran ini ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal lebih jauh dari sungai namun perilakunya seperti membuang sampah sembarangan dan membangun di lahan resapan justru memperparah risiko banjir bagi semua orang.

Pasca banjir besar 2024, BPBD OKU segera mengambil langkah perbaikan dengan mempersiapkan alat peringatan dini untuk memantau ketinggian air secara lebih akurat dan real-time. Secara keseluruhan, sistem manajemen bencana yang berjalan di BPBD OKU dinilai cukup efektif sebuah penilaian yang mencerminkan sikap profesional yang mengakui capaian yang telah diraih sekaligus menyadari masih banyaknya ruang untuk perbaikan. Ke depannya, BPBD OKU berharap masyarakat dapat semakin mandiri dan lebih peduli terhadap lingkungan, mampu melakukan kesiapsiagaan secara mandiri sebelum banjir terjadi. Pada akhirnya, keberhasilan penanggulangan bencana tidak semata-mata bergantung pada kecanggihan peralatan, melainkan pada seberapa siap dan tangguhnyanya masyarakat dalam menghadapi ancaman.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal penting mengenai manajemen pencegahan dan kesiapsiagaan banjir oleh BPBD Kabupaten OKU.

(1) BPBD Kabupaten OKU telah menjalankan sistem manajemen bencana yang cukup terstruktur. Program sosialisasi KIE yang menjangkau sekolah, kader Posyandu, dan masyarakat di daerah rawan bencana adalah langkah yang tepat sasaran. Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana yang sudah mencapai 80% pada 2025 juga menunjukkan komitmen yang serius. (2) sistem peringatan dini berbasis relawan yang memanfaatkan WhatsApp group terbukti efektif dan efisien. Jaringan 9 pos relawan di kecamatan memastikan informasi dapat mengalir cepat dari lapangan ke masyarakat. Ini adalah model yang layak dipertimbangkan oleh BPBD daerah lain. (3) banjir besar 2024 menjadi momen penting yang mendorong peningkatan kapasitas BPBD OKU, terutama dalam hal peralatan. Bantuan dari

pemerintah pusat berupa perahu, senter, dan logistik secara signifikan memperkuat kemampuan operasional BPBD. (4) masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan: penambahan SDM terlatih, percepatan penyelesaian dokumen kajian risiko bencana, dan penguatan kerja sama tertulis dengan berbagai instansi dan sektor swasta. Edukasi berkelanjutan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan juga harus terus ditingkatkan. (5) visi BPBD untuk membangun masyarakat yang mandiri dan siap siaga merupakan tujuan yang sangat strategis dan tepat. Kemandirian masyarakat dalam menghadapi bencana adalah investasi jangka panjang yang paling efektif dan efisien dalam penanggulangan bencana.

## DAFTAR RUJUKAN

- Al-Haque, D. (2017). Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Prabumulih dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal ASDAF, Institut Pemerintahan Dalam Negeri*. Diakses dari: <http://eprints.ipdn.ac.id/8106/>
- Armando, dkk. (2023). Mitigasi Bencana Banjir Secara Terpadu dan Kolaboratif. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(3). Diakses dari: <https://doi.org/10.31258/jkp.v14i3.8263>
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2008). Peraturan Kepala BNPB No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana. Jakarta: BNPB. Diakses dari: <https://www.peraturan.go.id/id/peraturan-bnpb-no-4-tahun-2008>
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2012). Peraturan Kepala BNPB No. 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. Jakarta: BNPB. Diakses dari: <https://jdih.bnpb.go.id/dokumen/Peraturan/perka-nomor-2-tahun-2012>
- Fauzan, F., dkk. (2026). Analisis Permasalahan Banjir dan Strategi Mitigasi Bencana Banjir di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. *Indonesian Journal of Environment and Disaster*, 5(1).
- Humaidah, M., Nurhayati, W., & Widodo, H. (2023). Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang dalam Mengurangi Kerugian Material dalam Bencana. *Wissen: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(4), 58–68. Diakses dari: <https://journal.appisi.or.id/index.php/wissen/article/view/6>
- Ivo Bria, J. K., Kase, P., & Rene, M. O. (2025). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Malaka pada Tahun 2024. *Kybernology: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik*, 3(1), 139–156. Diakses dari: <https://doi.org/10.71128/kybernology.v3i1.238>
- Marta, D. J., & Fersari, T. P. (2025). Manajemen Bencana Banjir Dalam Meningkatkan Ketahanan Wilayah Oleh BPBD Kota Semarang. *Jurnal Riptek*, 19(1), 39–48. <https://doi.org/10.35475/ripteck.v19i1.306>
- Muzdalifah, S., Mafriana, S. B., Sompaa, A. T., & Attijani, M. K. (2023). Efektivitas Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi dalam

- Penanggulangan Banjir di Kalimantan Selatan. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 8(2), 238–249. Diakses dari: <https://doi.org/10.33506/jn.v8i2.1898>
- Yunus, & Irnayanti. (2025b). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Pasca Bencana Banjir di Desa Dampal Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala: *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(5), 2319–2327. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/7524>
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Jakarta: Sekretariat Negara. Diakses dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39901/uu-no-24-tahun-2007>
- Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Jakarta: Sekretariat Negara. Diakses dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/4833>
- Sagay, S. D. C., & Pangemanan, F. (2023). Efektivitas Sistem Peringatan Dini untuk Mitigasi Bencana Banjir di Kota Manado. *Jurnal Governance*, 3(1). Diakses dari: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/47094/41980>
- Siregar, T., & Ginting, S. (2023). Efektivitas Kebijakan Penanggulangan Pra Bencana Banjir BPBD di Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 5(2). Diakses dari: <http://jmiap.ppj.unp.ac.id/index.php/jmiap/article/view/618>